

**PARADIGMA KOMUNIKASI POLITIK  
DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI\***

Oleh : Alex Sobur\*\*

**ABSTRAK**

Reformasi tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Tetapi demokrasi, menurut analisi para pengamat sosial-politik, tidak mungkin berlangsung jika masyarakat madani atau *civil society* lemah dalam berhadapan dengan negara. Demokrasi, demikian pendapat itu, akan berlangsung jika *civil society* kuat dalam berhadapan dengan negara. Pada dasarnya, konsepsi dasar *civil society* adalah menolak otoriternya penguasa dalam menjalankan kehidupan bernegara, dan perlunya menanamkan kehidupan berdemokrasi.

Tingkat kemunculan *civil society* di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Hal ini selain karena disebabkan kekuasaan negara yang sangat besar, juga karena kapasitas warga sendiri yang memang masih belum mampu mewujudkan hal itu.

Untuk membangun *civil society* (masyarakat madani), sedikitnya diperlukan empat syarat, yaitu : otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang bersifat otonom, dan arena publik tersebut bersifat terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

---

\* Makalah Juara ke III, LKTI dosen Unisba Tahun Akademik 1999-2000

\*\* Alex Sobur adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba.

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Ternyata, suatu ramalan atau prediksi, jika keliru, tidak selalu mengecewakan, menyedihkan, atau menyakitkan, sebab terkadang ada pula justru yang menggenbirakan, yang menyenangkan. Ramalan atau prediksi para pengamat politik kita, para Indonesianis (para pengamat asing tentang Indonesia), dan kalangan paranormal, bahwa masa pemilu (pemilihan umum) di Indonesia, mulai dari masa kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, akan dipenuhi oleh kerusuhan dan kekacauan, ternyata tidak terbukti, meleset, alias keliru besar. Tak cuma itu, pelaksanaan Sidang Umum MPR 1999 pun dilalui dengan “sangat mulus”, dengan terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1999-2004. Andai saja ramalan itu menjadi kenyataan, tak dapat dibayangkan betapa bangsa kita akan kian terpuruk ke jurang penderitaan dan kekacauan yang sulit diketahui kapan bisa berakhir. Kini, yang perlu dilakukan pascapemilu dan Sidang Umum MPR adalah kerja keras meneruskan gerakan reformasi untuk mewujudkan masa depan bangsa kita yang jauh lebih baik, menuju “Indonesia Baru”. Pemilu yang baru saja kita lalui, meski masih terdapat kekurangan di sana-sini, adalah bagian integral dari proses demokratisasi dan sekaligus jalan terbaik untuk membangun pemerintahan yang dapat dipercaya oleh rakyat. Memang, reformasi tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Tetapi demokrasi, menurut analisi para pengamat sosial-politik, tidak mungkin berlangsung jika masyarakat madani atau *civil society* lemah dalam berhadapan dengan negara. Demokrasi, demikian pendapat itu, akan berlangsung jika *civil society* kuat dalam berhadapan dengan negara. Pada dasarnya, konsepsi dasar *civil society* adalah menolak otoriternya penguasa dalam menjalankan kehidupan bernegara, dan perlunya menanamkan kehidupan berdemokrasi. Dalam konteks komunikasi politik, suatu hal yang jarang disadari adalah bahwa komunikasi dalam

masyarakat, secara tak terhindarkan melibatkan kekuasaan. Proses komunikasi dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan penyampaian dan penyaluran informasi, aspirasi, tuntutan -- atau pun “*petunjuk*” dari atas -- adalah sesuatu yang terjadi di dalam matriks kekuasaan yang ada.

Pembicaraan tentang komunikasi politik dan pembangunan masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia, tidak bisa tidak, akhirnya bermuara pada pembicaraan mengenai pemerintahan yang demokratis. Hal ini tidak bisa dielakkan karena komunikasi politik hanya dimungkinkan bila ada suatu kebebasan dalam menyatakan pendapat. Dalam pemerintahan demokratis, rakyatlah yang menentukan siapa yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemerintahan.

Selama kira-kira tiga puluh tahun terakhir budaya komunikasi politik Indonesia memakai pendekatan atau model *top-down*, atau “*teori peluru*” komunikasi. Akibatnya, sudah dipastikan, semua saluran komunikasi dari bawah ke atas praktis tertutup rapat. Komunikasi dua arah atau model “*Neo Lasswell*” tidak bisa berkembang. Hebatnya, model komunikasi *top-down* tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap arus informasi dan komunikasi horizontal (komunikasi dalam masyarakat).

Maka itu, masyarakat dan media massa tidak bebas menyampaikan dan menerima informasi secara terbuka. Dalam kurun waktu yang begitu panjang dan dan membosankan itu, banyak sekali terjadi pembredelan pres sebagai perwujudan budaya komunikasi politik yang memakai model *top-down* itu. Bahkan Mahkamah Agung, yang semestinya tidak ikut-ikutan melakukan pembredelan, justru ikut melakukannya karena “*mengamini*” sistem kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai perisai dan sekaligus sebagai tumbal atau korban kekuasaan politik.

Akibatnya, selama lebih tiga puluh tahun, budaya komunikasi “*di bawah permukaan*” menjadi subur; munculah ungkapan plesetan, selentingan, gosip, anekdot politik, hu,or politik, kabar burung, dan se-“*bangsa*”-nya. Semuanya dialamatkan kepada

rezim Orde Baru, yang selama lebih dari 30 tahun, memang berjaya membangun sistem yang mengagungkan kekuasaan dan kehidupan mewah (*hedonisme*). Otomatis kehidupan demokrasi, keterbukaan, hak politik rakyat, keadilan, negara hukum, hak azasi manusia (*HAM*) dan kedaulatan rakyat, tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya. UUD'45 dan Pancasila pun terpaksa mengalami banyak sekali penyimpangan dalam pelaksanaannya, meskipun di lain pihak, rezim Orde Baru selalu mengancam masyarakat agar jangan coba-coba mengubah UUD'45 – suatu ironi atau absurditas yang mencolok mata.

Guna menutup ketakutan yang kurang beralasan tersebut, kemudian dibuatlah referendum untuk pelaksanaan pasal 37 UUD'45 yang jelas-jelas inkonstitusional.

Pengamat politik muda, Eep Saefullah Fatah, menyebut kekuasaan Orde Baru sebagai “*kekuasaan yang sangat sombong dan angkuh*” (Fatah, 1998: x). kesombongan dan keangkuhan kekuasaan itu, menurut Eef, terlihat dari praktik-praktik *sosial-ekonomi-politik* yang mengabaikan, bahkan mengorbankan kepentingan publik, menghindari keterlibatan masyarakat dalam proses kerjanya (*non partisipatoris*), dan mengalinenasi diri dari hiruk-pikuk dinamika di luar “*kamar pengambil kebijakan*” (*eksklusif*). Konsekuensi terpenting dari praktik-praktik semacam itu, lanjut Eef, adalah kekuasaan – *perlahan tapi pasti* – menjadi tuli.

Dalam konteks itu, jatuhnya Soeharto – bagian sangat penting dari kekuasaan Orde Baru – oleh Gerakan Reformasi 1998 yang berpuncak pada Revolusi Mei, sebetulnya merupakan keniscayaan sejarah yang tertunda. Sebab, perjalanan sejarah, khususnya sejarah dua dekade terakhir sebagaimana digambarkan Samuel P. Huntington dalam bukunya *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century* (1991), menggambarkan bahwa kekuasaan yang pongah bakal tertolak dan mengalami pengerosan. Bahwa membentuk kekuasaan yang

pongah, meminjam kata-kata Eef, **“adalah menggali lubang kubur sendiri”** (Fatah, 1998 : xv).

Di tengah gemuruh gerakan reformasi di Indonesia saat ini, memang salah satu tema yang sering dibicarakan banyak pemikir adalah bagaimana membangun masyarakat yang lebih baik, yang sering disebut **“masyarakat madani”**, **“masyarakat kewargaan”** atau **“masyarakat warga”**, yang tampaknya adalah terjemahan dari –dan mengacu pada konsep– **“civil society “**

Apa sebetulnya yang dimaksud dengan masyarakat madani? Apa karakteristiknya? Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika masyarakat madani ingin diwujudkan? Apakah masyarakat madani sama dengan **civil society** yang tumbuh dan berkembang di Barat? Bagaimana cara membangun masyarakat madani? Mungkinkah masyarakat madani diwujudkan jika disinari cahaya Islam? Bagaimana hubungan antara Islam dan masyarakat madani? Apa hubungan masyarakat madani dengan demokrasi dan komunikasi? Dalam hubungannya dengan komunikasi, pendekatan atau paradigma komunikasi politik macam apa yang bisa digunakan dalam upaya mewujudkan masyarakat madani?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ingi sangat menarik untuk diketahui. Berdasarkan atas uraian serta berbagai pertanyaan itu pula yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang masalah **“Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Mengingat komunikasi politik telah berhasil mencatat beberapa paradigma pada beberapa dekade terakhir ini; dan paradigma sebagai *frame of meaning* (kerangka makna) acapkali dipengaruhi oleh paradigma lain; mengingat pula bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani demikian kompleks, maka perlu kiranya penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, yakni sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat apa yang diperlukan untuk terwujudnya *civil society* ?
- 2) Bagaimana prospek *civil society* di Indonesia ?
- 3) Paradigma komunikasi politik seperti apa yang bisa digunakan untuk membangun *civil society* di Indonesia ?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ingin mengetahui dan memahami berbagai komponen yang diperlukan sebagai syarat untuk terwujudnya *civil society*, mengingat bahwa *civil society* itu bukanlah sebuah masyarakat yang dengan mudah bisa kita artikan.
- 2) Ingin mengetahui dan memahami prospek *civil society* di Indonesia dengan melihat dan menganalisis kondisi riil yang ada, hambatan—hambatan yang dihadapi, proses yang terjadi, serta peluang-peluang yang mungkin bisa dikembangkan.
- 3) Ingin memahami dan menjadikan analisis tersebut sebagai sesuatu yang lebih utuh, dengan melihat paradigma-paradigma komunikasi politik yang berkembang pada beberapa dekade terakhir ini, untuk kemudian dikaji secara kritis, sehingga paradigma yang dipilih dapat digunakan untuk membangun *civil society* di Indonesia.

## II. Telaah Pustaka

### 2.1. Pengertian Komunikasi Politik

Apa itu komunikasi politik ? **Gabriel Almond** (dalam Alfian, 1991 : 1) pernah mengkategorikannya sebagai satu dari

empat fungsi *input* sistem politik. Kemudian mereka yang memakai pendekatan komunikasi politik terhadap sistem politik telah menjadikan komunikasi politik sebagai penyebab bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Ia, kata Alfian, diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya, tapi apa yang terkandung di dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup. Komunikasi politik, sebagai layaknya darah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik; dan hasil pemrosesan itu, yang tersimpul dalam fungsi-fungsi *out-put*, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi *feedback* sistem politik. Begitulah, komunikasi politik menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis.

Jika kita membuka buku-buku teks tentang komunikasi politik yang diterbitkan di Amerika, kita akan menemukan bahwa yang dimaksudkan komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh dukungan publik bagi seorang kandidat atau kebijaksanaan politik. Makanya tidaklah heran jika contoh komunikasi politik yang dimaksud acapkali berupa kampanye pemilihan umum yang dilakukan seorang kandidat politik. Jadi, apa yang dimaksud komunikasi politik di sini tidak lain adalah upaya komunikasi politik guna mempengaruhi proses politik.

Di dalam upaya memahami persoalan komunikasi politik di Indonesia, pengertian tersebut di atas tampaknya kurang relevan, sebab masalah komunikasi politik yang berkaitan dengan pembangunan dewasa ini bukanlah masalah mencari dukungan publik – karena sulit untuk mencari orang yang tidak setuju dengan pembangunan yang tengah dilaksanakan, misalnya – namun lebih menyangkut upaya menghilangkan hambatan di dalam proses komunikasi politik, yaitu proses melakukan ekspresi pendapat, sikap, atau perilaku, baik perorangan maupun kelompok, yang bertujuan guna mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai masalah yang berhubungan dengan pemerintahan dan

pembangunan. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa hal-hal yang menyangkut masalah pemerintahan dan pembangunan pada hakikatnya merupakan masalah seluruh anggota masyarakat Indonesia. Atau bila kita rumuskan secara singkat, masalah komunikasi politik di Indonesia adalah adanya kendala kekuasaan terhadap proses komunikasi dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Karena kekuasaan merupakan hal yang bersifat makro, maka dampaknya sangat terasa pada segenap kelompok dan lapisan yang ada (Setiawan, 1991).

Dalam bukunya *Political Communication and Public Opinion in America*, secara formulatif **Dan Nimmo** kurang memberi kejelasan tentang apa yang dimaksud komunikasi politik tersebut. Dalam ungkapannya ia hanya menyatakan (Nimmo, 1980 : 7) :

*“... It is a book of political communication (activity) consider political by virtue of its consequences (actual and potential) which regulate human conduct under conditions of conflict”*

Pada uraian di atas, Nimmo mengartikan komunikasi politik lebih kepada kecenderungan kondisi konflik. Apa yang melatar belakangi pemikiran dia tentang penggunaan pengertian itu, tidaklah jelas.

Definisi lain yang lebih praktis namun cukup tegas dikemukakan **Michael Schudson** dalam sebuah tulisannya, *“Sending a Political Message : Lessons from the American 1790s”*. Menurutnya komunikasi politik itu, “Any transmission of message that has, or is intended to have, an effect on the distribution or use of power in society or on attitude toward the use of power” (Schudson, 1997 : 311).

Gejala komunikasi politik, menurut Schudson, dapat dilihat dari dua aspek. **Pertama**, bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. **Kedua**, bagaimana infrastruktur politik



merespon dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.

Menurut **Galnoor** (1980), komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran.

Pada dasarnya, rumusan Galnoor tersebut sejalan dengan pendekatan Almond dan Powell (1966) yang menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi-fungsi lainnya (artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen) yang terdapat dalam suatu sistem politik. Bahkan dikemukakan pula bahwa fungsi komunikasi merupakan persyarat (prerequisite) yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain tadi. Menurut Almond dan Powell (1978:152) :

*“Komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar (basic function of the system) dengan konsekuensi yang banyak untukeliharaan atau pun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya bisa mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Semua proses sosialisasi misalnya, merupakan proses komunikasi, meskipun komunikasi tidak harus selalu menghasilkan perubahan sikap (attitude change). Sama halnya, koordinasi dan pengendalian individu dalam peran-peran organisasional yang berbeda memerlukan pengkomunikasian informasi. Jadi, menegakkan suatu pola sosialisasi baru dan membangun organisasi-organisasi baru membutuhkan perubahan dalam penampilan komunikasi”*

pada umumnya, para teoritis dan ilmuwan komunikasi atau ilmuwan politik menempatkan komunikasi ini dari dua sisi yang terpisah, yaitu komunikasi di satu sisi dan politik disisi lain, kemudian dipadukan dalam satu pengertian. Suatu formulasi komunikasi politik yang menempatkan komunikasi politik dalam satu totalitas, yaitu konstruksi pengertian yang dikemukakan oleh Astrid S. Soesanto. Dikatakan:

*“Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik”*  
(Sumarno & Suhandi, 1993:3).

Maswadi Rauf mengartikan komunikasi politik sebagai *“Penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti yang luas”* (Rauf & Nasrun, ed., 1993:8). Selanjutnya Rauf menjelaskan bahwa *“dalam arti yang luar”* mengandung makna, proses komunikasi tersebut dapat berlangsung di setiap lapisan masyarakat melalui seluruh apa saja yang dapat dipergunakan dan tersedia. Oleh karena itu, menurut Rauf, setiap saluran komunikasi politik sama pentingnya. Seluruh tata muka/langsung sama pentingnya dengan saluran media massa.

## **2.2 Komunikasi Politik sebagai Bidang Sebuah Kajian**

Sebenarnya, baik di lingkungan ilmu komunikasi maupun ilmu politik, komunikasi politik terus berkembang pesat sebagai suatu bidang kajian tersendiri yang komprehensif dan mendalam. Yang menjadi fokus bidang ini, menurut Zulkarimein Nasution, antara lain adalah pembahasan tentang fungsi praktis komunikasi politik dalam kehidupan politik suatu masyarakat, cara-cara dan teknik-teknik yang digunakan, pihak-pihak yang ikut serta dalam

prosesnya, saluran-saluran yang dimanfaatkan, serta simbol-simbol yang dipakai. Juga dipelajari dengan seksama bagaimana hubungan timbal balik antara kenyataan kehidupan politik pada suatu masyarakat dengan aktivitas komunikasi yang berlangsung (Nasution, 1990:23).

Banyak pernyataan para pakar yang menunjukkan kedekatan komunikasi dengan politik. Galnor (1980), misalnya, mengatakan bahwa ***“Tanpa komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik.”*** Pernyataan lain datang dari Pye (1963), bahwa ***“... tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (enlarging) dan melipatgandakan (magnifying) ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, maka di situ tidak akan ada suatu politik yang dapat merentangkan suatu bangsa.”***

Harus diakui bahwa pendapat para ahli tersebut tampaknya cukup mengesankan, dan dengan alasan-alasan yang telah mereka kemukakan cukup berdasar untuk sampai pada kesimpulan mengenai pentingnya pengembangan komunikasi politik sebagai suatu bidang kajian tersendiri.

Dalam ilmu politik masih relatif baru. Istilah tersebut mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond yang amat berpengaruh di dalam buku The Politics of the Developmen Areas pada tahun 1960. Almond, seperti dikutip Rauf (1993:21-22), berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik, sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Menurut Rauf, arti penting sumbangan pemikiran Almond terletak pada pandangannya bahwa sumbangan pemikiran yang pernah ada di dunia ini, yang ada sekarang, dan yang akan ada nanti, mempunyai persamaan-persamaan yang mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh semua politik. Hal ini membantah pandangan yang dianut semenjak lama bahwa sistem

politik yang satu sangat dari politik sistem lainnya, karena adanya perbedaan budaya, pengalaman, lingkungan, watak, dan lain sebagainya. Pandangan Almond, lanjut Rauf, menyadarkan para pembacanya bahwa perbedaan-perbedaan yang terlihat diantara sistem-sistem politik, hanya bersifat superficial dan tidak bersifat mendasar. Dalam pandangannya, kita tidak boleh tertipu oleh struktur politik yang tampak berbeda, karena fungsi-fungsi yang dijalankan oleh struktur politik dalam setiap sistem politik adalah sama.

Komunikasi politik adalah salah satu dari tujuan fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Dalam kata-kata Almond sendiri :

*“All of the functions performed in the political system political socialization and recruitment, interest articulation, rule making, rule application, and rule adjudication – are performed of communication* (dalam Rauf, 1993:22).

Dari kutipan di atas jelas bahwa komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.

### **2.3 Masyarakat Madani dan Civil Society**

Agaknya, dalam masyarakat telah berkembang pemikiran untuk membentuk sebuah masyarakat baru Indonesia. ITB, misalnya, pada tanggal 6 Juni 1998 telah mengadakan simposium besar-besaran yang bertema “Pencerahan Menuju Indonesia Baru”. Beberapa tokoh pemikir ikut berbicara dalam forum itu, misalnya: Islam dari Alisyahbana, Agum Gumelar, I Dewa Gede Raka, M. Amien Rais, Loekman Sutrisno. S. Bambang Yudoyono, dan Satjipto Rahardjo. Mula-mula, istilah yang dipakai dalam berbagai wacana itu adalah “masyarakat baru Indonesia” atau “masyarakat Indonesia yang modern”. Namun istilah-istilah itu kurang mengandung substansi, walaupun orang-orang tertentu mempunyai

pemikiran yang banyak mengenai istilah tersebut. Yang menarik adalah bahwa dalam simposium itu tak seorang pun yang menyebut istilah “masyarakat madani” atau civil society yang menunjukkan bahwa istilah itu belum mendapat perhatian atau mungkin belum dikenal di kalangan ilmuwan senior sekalipun.

Diskursus tentang masyarakat madani yang bergilir di Indonesia, bertolak dari konsep civil society, yang berkembang di Barat. Artinya, istilah masyarakat madani ini memang tidak memiliki sejarah di sini, melainkan merupakan istilah temuan kontemporer Prof. Naquib al-Attas (Rahardjo, 1999).

Sebagai terjemahan civil society, mau tidak mau kajian tentang masyarakat madani harus didekati melalui konsep civil society. Karena itu, suatu kajian yang tuntas mengenai ini miniscayakan panggilan lebih lanjut arkeologi pengetahuan tentang konsep ini (baca: civil society.) sejk Cicero, bahkan Aristoteles dan Plato.

Istilah “masyarakat madani”, seperti disinggung di muka berasal dari kata civil society, yang, karena sulit dicari terjemahannya, seringkali disebut dalam bahasa asalnya, Inggris. Namun kemudian, muncul terjemahannya dengan istilah “masyarakat sipil” yang menurut Dewan Rahardjo (1999), sebenarnya kurang kena, bahkan sering menimbulkan salah pengertian, misalnya dilawankan dengan “masyarakat militer”.

Sebuah artikel, umpamanya, muncul di harian Surya, dengan judul ” Civil Society versus Military Society” yang ditulis Muhadjir Effendy. Dalam artikel itu dikatakan bahwa membangun civil society, harus dibarengi dengan proses demiliterisasi masyarakat. Di situ military society disebutnya sebagai “puncak tabiat negatif political society”. Meskipun apa yang dikatakannya sebagai pandangan penulis, masyarakat militer itu tidak salah, namun lawan civil society, bukanlah military society, melainkan dalam konteks sekarang, adalah state atau negara; sedangkan lawan kata dari military adalah civilian (bukan civil).

Jadi, dikursus mengenai masyarakat madani dalam ilmu sosial, sesungguhnya tidak ada kaitannya ataupun dimunculkan sebagai suatu masyarakat yang menjadi lawan dari kelompok militer seperti yang umumnya diperdebatkan di Indonesia saat ini. Masyarakat madani dalam bahasa ilmu-ilmu sosial pada dasarnya diartikan sebagai konsep yang berkaitan dan dilawankan dengan “masyarakat politik” yang secara umum dipahami sebagai negara (Fakih, 1999).

Menurut Mansour Fakih (1999), jika ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya konsep civil society pertama kali timbul justru di Eropa, pada zaman “enlightment” atau yang dikenal sebagai masa pencerahan, yang konsepnya dapat dilacak pada pemikiran tokoh dan pemikiran ilmu sosial seperti Hobbes, Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Di kalangan ilmu sosial, liberal, pikiran mengenai masyarakat madani banyak mengacu pada pemikiran ilmuwan sosial Perancis, Tocqueville. Secara lebih terfokus, konsep masyarakat madani juga menjadi bahasa penting dari pemikir ilmu sosial kritis, seperti Hegel, Marx, dan terutama Gramsci. Karena itu, di Indonesia sendiri konsep civil society dipahami berdasarkan perspektif-perspektif penggunaan pemahaman Hegelian, Gramscian, dan Tocquevillian (Hikam, 1999). Orang-orang yang menggunakan pendekatan Hegelian tentang civil society menekankan pentingnya kelas menengah dan pemberdayaannya, khususnya pada sektor itu, pendekatan Gramscian telah diterapkan sebagian besar oleh para aktivis LSM yang bertujuan utama memperkuat civil society adalah sebuah arena tempat para intelektual organik dapat menjadi kuat yang tujuannya, orang-orang yang menerapkan pemahaman Tocquevillian tentang civil society menekankan penguatan organisasi-organisasi independen dalam masyarakat dan pencangkakan budaya sivil (civic culture) untuk membangun jiwa demokrasi.

Masyarakat madani dalam ilmu sosial pada perkembangannya lebih dipahami sebagai “kawasan privat” yang dilawankan terhadap konsep “negara” yang sering disebut sebagai

“kawasan publik”. Dalam tradisi ilmu sosial kritis, pembahasan dan kritik mereka terhadap kapitalisme akhirnya sampai pada pertanyaan penting menyangkut posisi negara di negara kapitalisme (Fakih, 1999). Oleh karena itu dalam tradisi ilmu sosial kritis, menurut Fakih, pembahasan civil society, erat kaitannya dengan pembahasan mengenai peran negara dalam melindungi kepentingan kapital.

Dalam bahasa konseptualisasi, kaum intelektual tampak setuju bahwa memang terdapat beberapa kesulitan untuk menerapkan konsep civil society dalam konteks keindonesiaan tanpa adanya beberapa catatan lebih lanjut. Hal ini sudah terlihat dalam usaha mengindonesiakan istilah ini. Sejauh ini, istilah civil society dalam diskursus publik telah diterjemahkan dengan “masyarakat madani”, “masyarakat warga/kewargaan”, dan “masyarakat sipil”. Istilah “masyarakat madani” yang dipopulerkan oleh Dr. Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, dipopulerkan oleh kalangan intelektual Muslim di Indonesia. Penggunaan istilah Arab “madani” (dari kata madinah), menurut Muhamad AS Hikam, dianggap tepat untuk menggantikan kata “civil”, karena ia mengimplikasikan pengertian komunitas yang beradab, yang berbeda dengan yang tak beradab atau tak berbudaya (Hikam, 1999).

Dalam perspektif Islam, seperti dikatakan M. Dawam Rahardjo, civil society lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Kata al din – yang umumnya diterjemahkan sebagai agama – berkaitan dengan makna al tamaddun, atau peradaban. Kebudayaan menyatu ke dalam pengertian al madinah yang arti hariyahnya adalah kota. Dengan demikian, maka civil society diterjemahkan sebagai “masyarakat madani”, yang mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban, dan perkotaan. Di sini, agama merupakan sumber; peradaban adalah prosesnya; dan masyarakat kota adalah hasilnya (Rahardjo, 1999).

Istilah “masyarakat warga/kewargaan” berkonotasi bahwa kerakyatan merupakan bagian integral dari civil society. Pada

awalnya, istilah ini dimunculkan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) serta secara bertahap memperoleh popularitas di kalangan kaum intelektual di Indonesia. Bagaimanapun, istilah “masyarakat sipil”, dalam kenyataannya, yang palong leterlek dengan istilah Inggris yang ada. Namun demikian, di bawah naungan udara perpolitikan Orde Baru, ia tidak banyak digunakan secara luas di Indonesia berkaitan dengan konotasinya yang mengarah pada politik kerakyatan (Hikam, 1999).

Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa sejumlah menyangkut persoalan konseptualisasi civil society, dikursus dikalangan kaum intelektua di Indonesia tidak terlalu berkutat dengan persoalan ketepatan penterjemahan istilah ini, melainkan lebih pada penggunaan praktisnya. Pemahaman mengenai pemikiran tentang penguatan posisi masyarakat dianggap sebagai dimensi esensial dari civil society.

### **III. Pembahasan**

#### **3.1 Syarat-syarat untuk Terwujudnya Civil Society**

Secara singkat dapat dikatakan bahwa Civil Society adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejumlah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Karena itu maka civil society adalah sebuah ruang yang terbebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara (Rau, dalam Rahardjo, 1999).

Civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial, misalnya keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara, namun sifatnya independen terhadap negara. Itulah yang disebut dengan civil society, kata Eisenstadt (dalam Gaffar, 1999:180). Jadi, civil society adalah sebuah



masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen.

Tentu saja, menurut Eisenstadt, masyarakat tersebut bukanlah masyarakat yang secara mudah kita artikan. Tetapi, masyarakat yang memiliki komponen tersebut sebagai syarat adanya civil society itu. Kelompok tersebut meliputi: (1) otonomi, (2) akses masyarakat terhadap lembaga negara, (3) arena publik yang bersifat otonomi, dan (4) arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat (Gaffar, 1999:180-185).

### **3.1.1 Otonomi**

Yang dimaksud dengan otonomi di sini ialah bahwa sebuah civil society haruslah merupakan sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik, ataupun bidang sosial. Dalam masyarakat seperti itu, segala bentuk kegiatannya sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari negara. Kalangan masyarakat, kalau mau melakukan kegiatan ekonomi, dapat dengan leluasa melakukannya. Negara hanya merupakan fasilitator, misalnya melakukan regulasi yang diperlukan dalam mengatur kompetisi dan melindungi kepentingan publik.

Selanjutnya, maka otonomi dari civil society di sini adalah kemandirian dalam melakukan inisiatif untuk melakukan kegiatan dan kemandirian dari intervensi negara yang tidak seharusnya dilakukan. Demikian juga kemandirian dalam bidang politik. Organisasi politik, seperti partai-partai politik, organisasi massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan, dapat melakukan kegiatan apa saja, sepanjang hal yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Partai politik dan kelompok kepentingan boleh melakukan kongres, muktamar, musyawarah nasional, dan pertemuan-pertemuan lain. Semua kekuatan politik yang ada dapat dengan leluasa melakukan apa yang disebut rekrutmen politik. Artinya, mereka mau memilih

pemimpinnya dapat saja mereka lakukan sesuai dengan keinginan mereka. Campur tangan negara sangatlah terbatas.

### **3.1.2 Akses Masyarakat terhadap Lembaga Negara**

Komponen kedua dari syarat sebuah civil society adalah akses masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, setiap warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, harus mempunyai akses terhadap agencies of the state. Artinya, individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya, apakah dengan menghubungi pejabat (contacting) untuk menyampaikan aspirasi dan uneg-uneg mereka, menulis pikiran pembaca di media massa, atau dengan terlibat secara langsung ataupun tidak dalam organisasi politik yang ada. Bahkan sampai dengan cara unjuk rasa agar kasus mereka mendapat perhatian secara luas di segenap lapisan masyarakat. Kemudian, lebih dari itu, kalangan negara atau pemerintahan harus memberikan komitmennya untuk mendengar, menerima keluhan dan aspirasi warganya, dan teruskan dengan mengambil sejumlah langkah konkret untuk keperluan tersebut.

### **3.1.3 Arena Publik yang Otonom**

Komponen yang ketiga dari syarat sebuah civil society terletak pada tumbuh dan berkembangnya arena publik yang bersifat otonomi, di mana berbagai macam organisasi sosial dan politik mengatur diri mereka sendiri. Arena publik adalah suatu ruang tempat warga negara mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan, bidang ekonomi atau bidang lainnya. Mereka yang mau menjalankan usaha dan mengembangkan bisnisnya, dapat melakukannya dengan leluasa. Mereka yang hendak menjalankan kegiatan keagamaan atas dasar keyakinannya, dapat melakukannya dengan bebas. Dan mereka yang melakukan kegiatan politik, dapat pula mewujudkannya. Arena publik ini pada prinsipnya terlepas dari smpur tangan negara, apalagi elemen yang bersifat koersif. Meski begitu, kalangan masyarakat yang bersifat independen ini harus mampu membuka

kesempatan kepada negara agar bisa memiliki akses terhadap mereka.

### **3.1.4 Arena Publik yang Terbuka**

Komponen yang keempat dari ciri atau syarat ***civil society*** adalah yang menyangkut arena publik tersebut, yaitu arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan cara yang bersifat rahasia, eksklusif, dan ***setting*** yang bersifat komporatif. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupannya, bahkan ikut terlibat di dalamnya. Diskusi yang bersifat terbuka, yang membijaksanakan publik, merupakan suatu keharusan, sehingga kebijaksanaan publik tidak hanya melibatkan sekelompok kecil orang.

### **3.2 Prospek Civil Society di Indonesia**

Sementara ahli menyatakan bahwa gerakan-gerakan prodemokrasi merupakan salah satu persyaratan penting bagi pembentukan ***civil society***. Namun, dalam perspektif ini gerakan-gerakan prodemokrasi hampir diidentikan dengan gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintah yang dipandang represif dan dikatoris. Konsekuensinya, suatu gerakan baru bisa disebut prodemokrasi apabila selalu berseberangan secara tegas dengan Azyumardi Azra, anggapan ini sering melupakan kenyataan bahwa gerakan-gerakan prodemokrasi itu sendiri tidak demokratis, atau bertentangan dengan nilai-nilai ***civil society*** lainnya (Azra, 1999:vii).

Dalam kaitan itu, menarik untuk dipersoalkan, apakah di Indonesia sudah terwujud ***civil society*** ? Jika belum, apa yang menjadi penghambatannya ? Atau kalau sudah dan sedang mengalami proses, kira-kira bagaimana prospeknya dalam menyambut sebuah masyarakat “Indonesia Baru” memasuki abad XXI, yang dihadapkan pada apa yang sudah sering didengarkan, yaitu arus globalisasi ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apa yang kita sebut sebagai ***civil society*** di

Indonesia masih belum dapat ditemukan. Karena, masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial, di satu pihak, dan dipihak lain, kekuasaan negara transformasi sosial yang membawa masyarakat pada suatu tahap, seperti apa tingkat modernitas masyarakat itu, sebagaimana dinyatakan Nicos Mouzelis (dalam Gaffar, 1999).

Lihatlah kondisi sosial-ekonomi masyarakat kita sekarang ini, dengan indikator yang sudah sangat umum disampaikan kepada masyarakat. Tidak jarang, indikator tersebut bersifat mengecoh atau misleading. Ekonomi Indonesia, misalnya, selama dasawarsa terakhir ini mengalami pertumbuhan sekitar 7%. Suatu prestasi yang diakui siapa pun di dunia internasional. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia memasuki tahun 1990-an, telah melebihi angka US\$ 1.000. Sementara itu, tingkat kemampuan baca-tulis orang dewasa telah melewati ambang kritis, yaitu sekitar 90%. Tetapi, apakah ini menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang sebenarnya ? Jawabannya tentu saja tidak.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik. Atau lebih tepat disebut, sebagaimana yang dikatakan Gaffar, (1999), masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya, apakah itu bersumber pada masalah ekonomi, sosial-budaya, etnisitas, juga termasuk bidang politik. Itu semua merupakan sesuatu yang setidaknya melambatkan perkembangannya.

Selain karena kekuasaan negara yang sangat besar dan tak terkontrol, lemahnya tingkat kehadiran dari civil society di Indonesia adalah karena kapasitas masyarakat yang memang masih belum mampu mewujudkan hal itu. Kecenderungan akan munculnya tribalisme seperti dalam kasus yang terjadi di Kalimantan Barat, merupakan contoh konkret. Masyarakat sendiri mempunyai kecenderungan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini bukanlah kondisi yang memungkinkan bagi munculnya civil society. Jika cara-cara kekerasan terjadi terus-menerus, tidak mustahil kehadiran civil

society tersebut akan semakin jauh di masa-masa mendatang. Dalam bahasa Azyumardi Azra, dikatakan :

*“Dalam suasana perubahan (reformasi politik) yang begitu cepat dan dramatis seperti sekarang ini, prospek masyarakat madani dalam tahun-tahun mendatang tampaknya serba belum pasti: ada perkembangan-perkembangan tertentu yang menggembirakan, kondusif, dan mendukung bagi penciptaan dan pengembangan masyarakat madani, tetapi pada saat yang sama ada juga perkembangan dan indikasi tertentu, yang kurang menggembirakan yang pada gilirannya dapat menjadi **constraints** bagi perkembangan masyarakat madani (Azra, 1999:v).”*

Dari uraian yang dikemukakan di atas, kita bisa melihat, bahwa tingkat kemunculan apa yang disebut sebagai civil society di Indonesia masih sangat rendah. Mengapa ? Jawabannya sederhana sekali, karena memiliki tingkat dominasi yang sangat tinggi. Tingkat kehadiran negara ini bisa kita temukan hampir semua dimensi kehidupan, apakah itu dalam bidang sosial, ekonomi, ataupun politik.

### **3.3 Paradigma Komunikasi Politik dalam Membangun Civil Society**

Berbicara tentang paradigma tentang paradigma komunikasi, B. Aubrey Fisher (dalam Ardianto, 1999) telah berhasil mencatat beberapa paradigma yang berkembang pada beberapa dekade terakhir ini. Dalam bukunya Perspective on Human Communiton, ia memrangkum komunikasi ke dalam empat paradigma, yaitu mekanistis, psikologis, interaksional, dan pragmatis.

Paradigma mekanistis ini menitikberatkan kejiannya pada efek komunikasi. Hal ini tercermin dalam kajian mengenai persuasi, efek media, difusi (komunikasi pembangunan) dan jaringan komunikasi, yang seluruhnya menggunakan metode eksperimental dan kuantitatif. Paradigma mekanistis ini sudah tidak asing lagi bagi

banyak orang, karena selain telah menghasilkan banyak studi, juga tidak terlalu sulit dipahami. Paradigma ini merupakan model lama atau model klasik dalam komunikasi.

Dalam paradigma psikologis, interaksional, dan paradigmatis, komunikasi tidak dikonseptualisasikan sebagai mekanistik.

***Paradigma psikologis***, komunikasi dikonseptualisasi atau dipahami sebagai proses dan mekanisme internal penerimaan dan pengolahan informasi pada diri sendiri. Eksistensi empiriknya terletak pada diri manusia (bukan pada seluruh sebagaimana dalam paradigma mekanistik), yaitu pada “kepala” individu yang dinamakan ***filter konseptual*** (seperti sikap, persepsi, keyakinan, dan keinginan). Metodologi yang digunakan pada umumnya eksperimental dan kuantitatif. Hal ini dapat dipahami, karena kajian dan pengembangan paradigma ini adalah pengaruh dari psikologi sosial.

Selanjutnya, pada ***paradigma interaksional*** komunikasi di konseptualisasi sebagai interaksi manusiawi pada masing-masing individu. Eksistensi empiriknya berada pada pengambilan peran individu-individu. Dalam paradigma ini, pesan/umpan balik/efek, sumber penerima, dan saluran, sama sekali tidak penting. Titik berat pengkajian dari paradigma ini adalah tindakan, khususnya tindakan sosial atau tindakan bersama. Metodologi jelas bukan eksperimental, melainkan lebih condong pada fenomenologis, analisis kontekstual dengan menggunakan data kualitatif. Peneliti biasanya berperan serta dalam penelitian yang dilakukan. Baik metodologi maupun teori dari aliran ini masih sedang tumbuh dan merupakan revolusi yang belum selesai.

***Paradigma pragmatis***, seperti halnya pada paradigma interaksional, revolusi terjadi pada paradigma pragmatis yang relatif paling baru di antara semua paradigma yang ada, dengan menerapkan teori sistem dan teori informasi dalam komunikasi. Dalam paradigma ini, komunikasi dipahami sebagai sistem perilaku. Eksistensi empiriknya berada pada pelaku yang berurutan,

sehingga komponennya meliputi pola, interaksi, sistem, struktur, dan fungsi. Titik berat atau fokus pengkajian dan penelitian adalah pada perilaku interaktif. Hal ini terlihat pada studi mengenai kategori perilaku, sistem komunikasi, fase-fase perkembangan kelompok dan lain-lain. Justru itu, penelitian dalam model pragmatis hanya mungkin dengan menggunakan analisis kualitatif dan satu dengan analisis interaktif.

Berdasarkan empat paradigma di atas, bila kita ingin mencari paradigma komunikasi (politik) dalam civil society, maka sudah jelas kita harus meninggalkan paradigma, konsepsi dasar dari civil society adalah menolak otoriternya penguasa dalam menjalankan kehidupan bernegara, dan perlunya menanamkan kehidupan berdemokrasi.

Inti dari paradigma mekanistik adalah menggambarkan bahwa komunikator (dalam hal ini penyelenggara negara) dinilai sangat perkasa (otoriter) dan masyarakat (rakyat) dinilai pasif, sehingga semua program kehidupan bernegara, hukum, komunikasi bisnis, komunikasi sosial, komunikasi budaya, dan komunikasi lainnya, selalu datang dari atas (top-down), bukannya dari bawah (bottom-up).

Budaya komunikasi politik yang memakai model top-down itu sangat jelas direfleksikan oleh berbagai produk legislatif seperti Tap-delik MPR dan oleh sejumlah undang-undang organik. Antara lain dan terutama paket lima UU Politik, UU Subversi, UU Pokok Pers, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan delik-delik penyebar kebencian dalam Buku II KUH-Pidana. Begitu besar pemujaan terhadap kekuasaan dalam cara berpikir rezim Orde Baru, sehingga sambil mencela rezim Orde Lama dipakainya juga UU Antisubversi yang merupakan produk Orde Lama. Budaya komunikasi politik yang memakai paradigma top-down itu berakibat buruk pada pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan.

Analisis empiris yang bisa dikaji dalam kehidupan bernegara di Indonesia, yakni selama 32 tahun komunikasi politik pemerintahan rezim Orde Baru, jelas-jelas menggunakan paradigma

komunikasi mekanistik, sehingga semua program pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya datang dari pusat, sehingga mengakibatkan aspirasi masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan.

Karena itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat madani atau *civil society* dengan adanya *sharing power* (pembagian kekuasaan) yang “adil” serta penciptaan kehidupan demokrasi yang lebih baik, maka paradigma komunikasi mekanisme sudah saatnya kita “tinggalkan” untuk kemudian menjalankan paradigma lain yang lebih manusiawi, yakni: paradigma komunikasi psikologis, interaksional, dan pragmatis. Ketiga paradigma komunikasi inilah yang bisa melihat adanya *bargaining position* atau *bargaining power* antara penguasa negara dan warganya.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran-saran**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan serta melihat tujuan yang ingin dicapai, dapatlah disimpulkan bahwa:

- 1) Untuk membangun *civil society* (masyarakat madani), sedikitnya diperlukan empat syarat, yaitu : otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang bersifat otonom, dan arena publik tersebut bersifat terbuka bagi semua lapisan masyarakat.
- 2) Tingkat kemunculan *civil society* di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Hal ini selain karena disebabkan kekuasaan negara yang sangat besar, juga karena kapasitas warga sendiri yang memang masih belum mampu mewujudkan hal itu.
- 3) Dalam konteks komunikasi politik, maka untuk membangun *civil society* diperlukan paradigma-paradigma yang lebih manusiawi, yaitu dengan menggunakan paradigma komunikasi psikologis, paradigma komunikasi interaksional, dan paradigma komunikasi pragmatis.

##### **4.2 Saran-saran**



- 1) karena makna otonomi dari *civil society* adalah kemandirian dalam melakukan inisiatif untuk melakukan kegiatan dan kemandirian dari intervensi negara, maka sebaiknya pemerintah tidak lagi melakukan praktek-praktek pelarangan segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh partai-partai politik, organisasi-organisasi massa, elompok-kelompok kepentingan, atau asosiasi-asosiasi warga lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah bisa memberikan komitmennya untuk mendengar dan mau menerima keluhan serta aspirasi warganya dan melakukan sejumlah langkah konkret.
- 2) Agar proses *civil society* di Indonesia bisa lebih berkembang, maka negara (pemerintah) dan warga sebaiknya bisa menjalankan hubungan yang bersifat lebih kooperatif.
- 3) Untuk membangun *civil society* di Indonesia, pemerintah seyogya tidak lagi menggunakan paradigma mekanistik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian, Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Ali, Novel, Peradaban Komunikasi Politik, Potret Manusia Indonesia, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Almond, G.A. dan Powell, G.B., Comparative Politics: A Developmental Approach, Little, Brown and Company, Boston, 1966.
- , Comparative Politics: System Processes and Policy, Little, Brown and Company, 1978.
- Ardianto, Elvinaro, "Kehadiran Ilmu Komunikasi, Paradigma Komunikasi Politik Rezim dan Masyarakat Madani," Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol IV/Oktober 1999.

- Fakih, Mansour, "Masyarakat Sipil: Catatan Pembuka," Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana, Edisi 1, Volume 1 1999, hlm. 2-6.
- Fatah, Eef Saeffuloh, Bangsa Saya yang Menyebalkan, Catatan tentang Kekuasaan yang Pongah, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1998.
- Gaffar, Afan, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Galnoor, I, "Political Communication and Study of Politics," dalam Nommo, D. (eds.), Communication Yearbook 4, ciation, Brunswich, NJ, 1980, hlm 99-112.
- Kiham, Muhamad AS, "Dikursus Intelektual tentang Civil Society di Indonesia," Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Unisia, No. 39/XXII/III/1999, hlm. 15-24.
- Hintington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Pres, Norman and London, 1991.
- Muis, A., "Reformasi Budaya Komunikasi Politik," Kompas,. 18 Juni 1998, hlm 4.
- Nasution, Zulkarimein, Komunikasi Politik, Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Nimmo, Dan, Political Communication and Public Opinion in America, Goodyear Publishing Company, Santa Monica, California, 1978.
- Pye, L.W. (eds.), Communication and Political Development, Princeton University Press, Princeton, 1963.
- Rahardjo, M. Dawam, "Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Penjajakan Awal," Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Volume I, Nomor 2, 1999, hlm. 7-32.
- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun (ed.), Indonesia dan Komunikasi Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Schudsoc, Michael, "Sending a Political Massage: Lessons from the America 1790s," dalam Media, Culture, and Society, 19,3: 311.

Setiawan, Bambang “ Komunikasi Politik dalam Pelaksanaan Pembangunan,” Prisma 6, Juni, hlm. 3-12.

Sumarno AP dan Didi Suhandi, Pengantar Studi Komunikasi Politik, Orba Shakti, Bandung, 1993.